



Judul : Senayan: hadirkan regulasi berkeadilan
Tanggal : Minggu, 12 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Ketenagakerjaan Senayan: Hadirkan Regulasi Berkeadilan

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetyani berharap, RUU Ketenagakerjaan mampu menghadirkan regulasi adaptif dan berkeadilan bagi masyarakat. Regulasi yang menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kebijakan, hak para pekerja, kestabilan dunia usaha, serta regulasi Pemerintah.

Menurutnya, ada beberapa isu yang jadi perhatian dalam pembahasan RUU ini yakni kepastian hubungan kerja, jenis perjanjian kerja, serta pengaturan outsourcing. "Juga soal perlindungan pekerja platform digital dan PHK, pengawasan ketenagakerjaan serta dialog sosial hubungan industrial," ujar di Gedung DPR, Kamis (9/7/2026).

Netty mengharapkan partisipasi publik yang bermakna selama seluruh proses legislasi berjalan. Keterlibatan aktif serikat pekerja, organisasi pengusaha, akademisi, hingga kalangan masyarakat sipil jadi faktor utama. Kehadiran mereka membuat regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat sekaligus mampu menjawab persoalan nyata lapangan.

Dia menilai, pembahasan RUU Ketenagakerjaan bakal jadi arena yang luas untuk mempertemukan berbagai kepentingan berbeda. Namun diyakini, persamaan di antara seluruh pihak jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan. Karena itu, publik harus benar-benar terlibat demi menghasilkan regulasi berkualitas tinggi.

Netty menjamin, proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan menghadirkan perlindungan

komprehensif, kepastian hukum, hingga tingkat kesejahteraan bagi para pekerja. Langkah itu juga dirancang kuat untuk mendukung terciptanya iklim investasi sehat. "Kondisi kondusif itu diharapkan bisa tercapai demi kemajuan bangsa Indonesia," harapnya.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jadi poin utama dalam pembahasan revisi UU ini. Setiap pasal mengenai perkembangan baru yang harus disikapi akan terus dipantau untuk dimasukkan ke dalam regulasi. Evaluasi mendalam bakal dilakukan demi melihat perkembangan dinamika lapangan.

Komisi IX DPR, lanjutnya, terus melakukan pembahasan intensif mengenai aturan RUU Ketenagakerjaan melalui berbagai tahapan legislasi. Agenda kerja itu termasuk menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait. Langkah ini bertujuan agar hasilnya komprehensif serta memastikan seluruh prosedur dapat berjalan baik.

Dia berharap, pembahasan di Komisi IX bisa segera dirampungkan, agar RUU Ketenagakerjaan bisa melangkah ke tahapan berikutnya. "Proses legislasi diperlukan karena usulan harmonisasi ke Badan Legislasi masih dalam proses," terangnya.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan harus jadi momentum tepat untuk membangun kontrak sosial baru dunia kerja Indonesia. ■ PVB